

## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) MENJAWAB TANTANGAN MASA DEPAN KE ARAH INTEGRASI BANGSA

Oleh : L. Hendrowibowo

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Diterima : 20 Februari 2001 /disetujui: 15 April 2001

### Abstract

Recently "SARA" cases appear to the direction of nation disintegration of course influences the learning in the school, which is not good. One of the lessons that close relationship with this problem is Religion Education and Civics Education. That is why according team national Education Departement needs the learning system in Civics Education.

The learning process of Civics Education with the paradigm is hoped can give the new inspiration for teacher to development the student capacity ti the nation integration and sicial concern. The new paradigm is shoed in the way of learning that is used in the Civics Education, that the process is very important. This case is different with the "Moral Pancasila" Education, the latter is nearly like an indoctrination.

The strategy which is used in giving material of Civics Education directed to the knowing and doing with values clarification method, problem solving and inquiry. On the hand for evaluation using direct observation, not only cognitif evaluation, but also afectif and psychomotor.

**Key words : Civics Education, New Paradigm, Nation Integration**

### Pendahuluan

Seperti kita ketahui akhir-akhir ini (setidaknya lima tahun terakhir) terjadi kerusuhan sosial yang berbau SARA, sejak dari Tasikmalaya (1996) Rengasdengklok (1997) Sanggau Ledo, Kalimantan Barat (1996, 1997, 2001), Ambon dan daerah Maluku yang lain (2000, 2001), Sambas, Kapuas, dan Pangkalan Bun (2000, 2001), dan bahkan Jakarta yang menjadi Ibukota negara tidak pernah absen dari kerusuhan sejak peristiwa Mei 1998. Di samping itu ditambah lagi adanya gerakan separatisme seperti gerakan Aceh Merdeka, Papua Merdeka, Gerakan Maluku Merdeka yang dimotori RMS dan bahkan setelah BJ. Habibie turun dari jabatan Presiden sebagaimana rakyat Makasar (Sulawesi Selatan) pun ingin merdeka.

Kejadian tersebut menggugah hati kita untuk menengok kembali peran pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan (PKn) dalam mencegah peristiwa tersebut kearah integrasi bangsa. Pola pembelajaran PKn dengan paradigma lama perlu diubah

dengan paradigma baru. Proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru diharapkan mampu memberikan inspirasi baru kepada guru untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam cara pembelajaran yang digunakan dalam PKn yang lebih mementingkan proses. Peran guru tidak hanya memberi pelajaran tetapi juga ikut membimbing dan melibatkan semua siswa dalam proses pemecahan persoalan yang ada di sekitar anak. Guru perlu "menginjeksikan" pengalaman baru, atau peluang baru pada siswa.

Supriyoko, dosen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dan sekaligus pemerhati pendidikan, yang berkunjung ke Pontianak selama seminggu, pasca kerusuhan mengatakan pada KR akhir tahun 1977, "untuk menghadapi berbagai tantangan yang mengarah pada disintegrasi bangsa, perlu diantisipasi oleh bangsa ini dengan pendidikan yang benar dan tepat, karena akar masalah kerusuhan di Pontianak tersebut tidak lepas dari peran pendidikan".

Pendidikan bukan sekedar alih pengetahuan yang mirip mengisi botol kosong tetapi merupakan kegiatan bersama sebagai masyarakat ilmiah yang tenggelam dalam proses mencari kebenaran. Guru dan siswa saling berinteraksi. Siswa diberi kesempatan untuk berpendapat dengan mengajukan argumentasi. Pendapat tersebut berinteraksi dengan pendapat siswa lain dan guru berperan sebagai fasilitator. Dari interaksi tersebut, akhirnya ditemukan pendapat logis, lebih lengkap dan lebih banyak manfaatnya. Dengan kata lain akan didapatkan suatu pendapat ataupun konsepsi yang paling baik. Dalam proses ini siswa dilatih menghargai pendapat siswa lain dan beradu argumentasi. Karena sering beradu argumentasi, mereka terdorong untuk selalu meningkatkan pengetahuannya agar dapat mengajukan argumentasi yang terbaik. Peran guru sebagai fasilitator selalu mengarahkan siswa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain dalam bingkai integrasi bangsa.

Pengembangan belajar PKn seperti ini, menurut Ace Suryadi (*Kompas*, 13 Januari 2001), Ketua Tim Nasional PKn Depdiknas, diawali oleh CICED melalui survai nasional atas hasil kurikulum Pendidikan Moral Pancasila yang dike-mudian ditindaklanjuti oleh Balitbang Depdiknas, dengan menjalin kerja sama LSM dan Perguruan Tinggi Negeri antara lain UPI, UNY, Universitas Malang, UGM, UI, Universitas Padang serta para ahli dan praktisi yang berpengalaman dalam bidang ini.

Chuck N Quigley, Direktur Eksekutif Center Civic Education Amerika Serikat dalam diskusi "Tim Nasional Pembaharuan PKn", yang diadakan oleh Depdiknas akhir Januari 2001 di Jakarta mengusulkan kemungkinan dibentuknya lembaga untuk mempersatukan pendidik di semua IKIP, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Depdiknas untuk mendukung pengembangan PKn. Chuck, lebih lanjut mengatakan, "Di AS sendiri sudah terbentuk jaringan civitas Amerika, yakni masyarakat pendukung PKn (Civics Education), yang tidak hanya terdiri

dari sektor pemerintah tetapi juga dari kalangan swasta.

Mengenai prospek Civics Education di Indonesia, Chuck mengungkapkan optimisnya bahwa PKn akan berhasil. Karena Indonesia sudah memiliki sejarah panjang tentang penerapan pelajaran Pancasila bahkan pernah dimasukkan dalam kurikulum, meskipun dalam penerapan PKn perlu mendapat penyempurnaan.

Sementara itu dalam hal yang sama, Hafid Abbas (*Kompas*, 30 Januari 2001), salah seorang pengamat pendidikan yang ikut dalam seminar tersebut mengatakan: "Untuk membangun warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab terhadap negara diperlukan PKn". Depdiknas dalam buku, *Standar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)*, mengatakan :

"Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi pengikat untuk menyatukan visi rakyat Indonesia yang beragam dari segi agama, bahasa, usia, dan suku bangsa tentang budaya kebersamaan yang dapat mendukung tetap berdirinya Republik Indonesia. Oleh karena itu, kewarganegaraan harus menjadi bahasa utama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dengan pembelajaran yang sistematis, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dan menerapkan ketrampilan intelektual dan partisipatori yang menghasilkan pemahaman tentang arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. (2000 : 2)".

Abdul Azis Wahab, Direktur Centre of Indonesia Civic Education (CICED) ketika memberikan sambutan dalam pameran dan gelar kemampuan siswa dalam uji coba model "Proyek Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia" di Bandung, 22 Januari 2001 mengatakan:

"Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan paradigma baru diharapkan dapat membangun kepekaan sosial dan kemahiran memecahkan masalah pada anak didik. Dengan paradigma ini, siswa diharapkan akan mempunyai ketrampilan menyusun usulan kebijakan dan rencana tindakan berkaitan dengan masalah yang selalu dihadapi di lingkungannya". (*Kompas*, 30 Januari 2001)".

Dari uraian di atas dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut benarkah PKn dengan paradigma baru membantu terwujudnya integrasi ?

### **Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan kewarganegaraan bukan pendidikan agama, meski tujuan *character building* pelajaran agama dan PKn sama, namun bahan yang dipakai berbeda. Pelajaran agama berpedoman pada ajaran Kitab Suci agama tertentu, sedangkan PKn memakai bahan lebih luas dari agama. Kalaupun dalam menyampaikan PKn disinggung ajaran agama, haruslah dalam lintas agama bukan ajaran agama tertentu. Untuk itulah seyogyanya guru agama bukanlah sekaligus guru PKn, karena dikhawatirkan siswa tidak mengetahui dengan pasti kapan guru tersebut memberikan pelajaran agama ataukah PKn.

Pendidikan kewarganegaraan ber-sumber pada ideologi Pancasila. Ideologi menuntut loyalitas dan ketertiban dari pengikutnya. Bagi ideologi Pancasila masalah loyalitas dan keterlibatan ini sangatlah penting, dalam arti yang berujud upaya-upaya untuk menegakkan atau mempertahankannya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan terlihat secara konsisten memancarkan tonggak-tonggak yang bermakna ideologis. Hal ini terbukti setelah Indonesia mencapai konsensus politis, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, serta menuangkannya di dalam alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

PKn didalamnya memuat pendidikan moral (budi pekerti), pendidikan politik, pendidikan falsafah negara, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bela negara, pendidikan sosial dan pendidikan budaya. Yang hendak dicapai dalam PKn ini adalah *character building*, yang nantinya akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku. Tepatnya pembelajaran ini adalah bagian penting upaya mencerdaskan moralitas manusia muda pada masa *formative years*-nya.

Adapun yang menjadi tujuan pendidikan kewarganegaraan: "membe-rikan kemampuan pada peserta didik untuk: (1)

berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, (2) berpartisipasi secara bermutu serta bertanggung jawab, dan bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan (3) membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter positif masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang demokratis". (Depdiknas, 2000:3).

Dengan demikian peserta didik dituntut berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dalam kegiatan berbangsa dan bernegara dalam khasanah/ bingkai negara kesatuan, yang berarti pula tetap harus berintegrasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Landasan Pendidikan Kewarganegaraan**

Landasan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia meliputi : landasan filosofis, landasan sosial budaya, dan landasan pedagogis.

#### **1. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis pendidikan umumnya mencakup (1) landasan ontologis, dan (2) landasan antropologis. Secara ontologis realitas pada dasarnya ada yang bersifat material dan ada yang bersifat non material. Pernyataan tersebut tidak menyimpang dari falsafah negara yakni Pancasila. Secara tersirat dalam Pancasila terungkap bahwa ada realitas yang fana dan berubah yakni segala sesuatu yang diciptakannya. Tuhan sebagai "Pencipta" menjadi sumber segala realitas yang diciptakannya dan realitas ciptaan Tuhan berada dalam perubahan yang berjalan berdasarkan aturan-aturan penciptanya.

Landasan antropologis menempatkan manusia sebagai ciptaan Tuhan, karena itu wujud dan sifatnya berbeda dengan "Penciptanya". Wujud penampilan manusia ada yang bersifat material (raga) dan ada yang bersifat non material (jiwa). Namun keduanya bukanlah merupakan hal yang dapat dipisah-pisahkan melainkan merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh.

## 2. Landasan Sosial-Budaya

Lingkungan sosial budaya mengandung dua unsur (1) unsur sosial, yaitu interaksi di antara manusia dan (2) unsur budaya, yakni bentuk kelakuan yang sama terdapat dikalangan kelompok manusia "budaya ini meliputi bahasa, nilai – nilai, norma kelakuan, adat kebiasaan dan sebagainya". (Nasution 1983 : 13). Anak manusia tidak dapat langsung "memasyarakat" dan "membudaya". Hal tersebut harus dipelajari sesuai dengan pertumbuhan anak tersebut.

Dalam tumbuh berkembangnya anak manusia tersebut akan mengalami perubahan-perubahan untuk mengikuti dan menyelesaikan perkembangan jaman. Namun hal yang tidak boleh ditinggalkan sebagai warga negara Indonesia dalam menyesuaikan diri tersebut adalah nilai-nilai dasar yang telah diakui dan dijadikan pedoman oleh bangsa Indonesia yakni Pancasila.

## 3. Landasan Pedagogis

Seperti disebutkan di atas, bahwa manusia pada saat dilahirkan dalam keadaan tak berdaya, ia belum dapat menolong dirinya sendiri. "Kemampuan yang dimiliki pada hari pertama dilahirkan hanya terbatas pada menangis, bersin dan kemampuan menghisap" (Langeveld, 1982 : 3). Dengan kata lain pada saat kelahirannya manusia berada pada kondisi tidak dapat apa – apa, oleh karena itu, ia memerlukan orang dewasa. Tanpa bantuan orang dewasa, seorang bayi tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Manusia barulah menjadi manusia berkat hubungannya dengan manusia lain dan bantuan ini diberikan melalui pendidikan.

Berdasarkan kenyataan diatas maka dapatlah kita pahami bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan "Bantuan yang sengaja diupayakan oleh orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa dengan tujuan agar anak didik mencapai kedewasaan. Lebih lanjut MI. Soelaerman (1988 : 51) menyatakan bahwa "pendidikan merupakan tindakan yang

dilakukan oleh manusia terhadap manusia, dalam situasi kemanusiaan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang berbobot manusia pula". Hal ini berkaitan dengan ditemukannya dua orang anak dipegunungan Himalaya, yang diasuh oleh binatang. Anak tersebut tidak dapat berbicara, belajar merangkak, tidur siang hari, keluar pada malam hari, makan daging mentah.

Manusia lahir oleh tuhan dibekali kata hati, yang mampu membedakan baik – buruk, benar – salah dan lain sebagainya. Ciri atau karakteristik inilah yang menjadikan manusia lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hewan, dan kata hati ini akan berkembang hanya melalui pendidikan. Hal ini senada dengan pernyataan MI. Soelaerman (1988 : 11-12) yang mengatakan :

Anak dilahirkan dalam keadaan lengkap dan tidak pula dalam keadaan kosong. Ia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Memang ia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa – apa, akan tetapi ia telah dibekali dengan pendengaran, pengelihatannya, dan kata hati (afidah), sebagai modal yang harus dikembangkan dan diarahkan kepada martabat manusia yang mulia, yaitu yang mengisi dan menjadikan kehidupan sebagai taqwa kepada Allah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis, sosial – budaya, dan pedagogis pada dasarnya mengarahkan manusia agar dapat hidup secara manusiawi sesuai dengan martabat manusia yang mulia dan menjadi warga negara yang baik, menjaga integritas (keutuhan) bangsa.

## Visi dan Misi PKn

Visi PKn adalah membangun bangsa yang berbudaya Pancasila, artinya Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan nasional serta cita-cita bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Sedangkan misi PKn adalah meningkatkan kualitas kemandirian manusia Indonesia ke arah persatuan bangsa. Pernyataan ini sebenarnya telah lama ada, bahkan Empu Tantular berabad-abad yang lalu telah mengatakan bhinneka tunggal ika (*e pluribus unum*), dari yang banyak menjadi satu. Konsep bhinneka tunggal ika, mempertahankan dan menghormati kebhinnekaan, keragaman, kemajemukan. Sirkumstansi sejarah menjadi pendorongnya, ke muara persatuan. Inilah aspirasi rakyat banyak yang sekaligus menjadi misi PKn, yakni tetap ingin menjadi satu bangsa.

### Tujuan Pembelajaran PKn

Pembelajaran PKn saat ini tidak lagi mengandung indoktrinasi berdasarkan kepentingan politik tertentu. Dalam pembelajaran PKn menerapkan model belajar portofolio. Portofolio adalah dokumentasi dan tampilan yang melukiskan keseluruhan prosedur dan kegiatan serta hasil kerja siswa. Neneng Suminarwati, guru SLTP Negeri 1 Cikeruh (*Kompas*, 23 Januari 2001) mengatakan "portofolio ini menjadi alat bantu yang bermanfaat bagi siswa untuk memahami dan menjelaskan suatu persoalan". Sementara bagi Alief Nugraha, siswa SLTP Negeri 13 Bandung mengatakan: "PKn baru ini telah memberikan semangat belajar yang baru. Ia mengaku, PKn telah mengajarkan kepada dirinya untuk peduli dengan persoalan di sekitarnya dan nasib orang lain". (*Kompas*, 23 Januari 2001).

Sasaran yang dituju dalam PKn bukan semata-mata pada pembentukan otak atau kemampuan kognitif, melainkan juga ditujukan pada pembentukan sikap atau kemampuan afektif, dan pembentukan perilaku atau kemampuan psikomotor. Sasaran-sasaran ini merupakan pencapaian tujuan pendidikan seperti yang dikemukakan oleh B.S. Bloom dalam *Taxonomy of Educational Objectives*.

Pendidikan kewarganegaraan hendak mewujudkan kemampuan-kemampuan dasar yang dibagi dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan.
  - a. Memahami tujuan pemerintahan dan prinsip-prinsip dasar konstitusi pemerintahan Republik Indonesia.
  - b. Mengetahui struktur, fungsi dan tugas pemerintahan daerah dan nasional serta bagaimana ketertiban warga negara membentuk kebijaksanaan publik.
  - c. Mengetahui hubungan politis Indonesia dan warganegaranya dengan bangsa-bangsa lain dan masalah-masalah dunia.
- 2.. Kemampuan untuk memiliki keterampilan kewarganegaraan
  - a. Mengambil atau menetapkan keputusan yang tepat melalui proses pemecahan masalah dan inkuiri.
  - b. Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan suatu isu tertentu, menentukan dan mengambil sikap guna mencapai suatu posisi tertentu.
  - c. Membela posisi dengan mengemukakan argumen yang kritis, logis, dan rasional
  - d. Memaparkan suatu informasi yang penting pada khalayak umum.
  - e. Membangun koalisi, kompromi, negoisasi, dan konsensus.
3. Kemampuan untuk menghayati dan mengembangkan karakter kewarganegaraan
  - a. memberdayakan dirinya sebagai warga negara independen, aktif, kritis, *well-informed*, dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi secara efektif dan efisien dalam berbagai aktivitas masyarakat, politik, dan pemerintahan pada semua tingkatan (daerah dan nasional)
  - b. mengerti bagaimana warga negara melaksanakan peranan, hak, dan tanggung jawab personal untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat pada semua tingkatan (daerah dan nasional).
  - c. Memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti, demokrasi, dan nasionalisme dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- d. Mengerti dan menerapkan prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. (Depdiknas, 2000: 4).

Dengan adanya PKn diharapkan dapat meminimalisasi kesenjangan antara teori dan praktek, sebab ilmu bukan hanya sekedar kekayaan intelektual saja tetapi juga mempunyai kegunaan praktis dan sekaligus siswa mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya peserta didik dapat berpartisipasi sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Latihan berpikir kritis, kegiatan memecahkan masalah, teknik belajar kooperatif dapat bermanfaat bagi peserta didik dalam menghayati dan melaksanakan sikap toleransi dan menghargai orang lain. Bila hal ini terwujud tentunya akan mendorong peserta didik bersosialisasi dengan teman di lingkungannya.

#### Metode Penyampaian Materi Pkn

Strategi penyampaian materi PKn memiliki ciri khas yang membedakan dengan bidang studi lain. Setiap materi pelajaran dalam bidang PKn bukan sekedar untuk dikerjakan sebagai suatu ketrampilan dan dihafalkan, melainkan untuk dipahami, dihayati dan diamalkan sesuai dengan aspek moralnya. Strategi penyampaian yang terbaik, sangat sulit ditemukan, sebab pada dasarnya pembelajaran PKn termasuk dalam kawasan afektif dan psikomotor. Dengan demikian metode/strategi penyampaian haruslah *integratif*, artinya integrasi dari beberapa metode, sebab pembelajaran PKn bukan hanya penalaran intelektual (kognitif) saja, melainkan satu kesatuan yang komprehensif dengan nilai dan sikap.

“Nilai (value) dan sejenisnya merupakan wujud daripada afektif (affective domain) serta berada dalam diri seseorang. Dan secara utuh dan bulat merupakan suatu sistem, dimana aneka jenis nilai (nilai keagamaan, sosial budaya, ekonomi, hukum, etis dll) berpadu menjalin serta saling meradiasi (mempengaruhi secara kuat) sebagai satu kesatuan yang utuh. Sistem nilai ini sangat

dominan/kuat menentukan perilaku dan kepribadian seseorang. (Achmad Kosasih Djahiri, 1985: 18).

Harmin Rath dan Simon (1985) menawarkan salah satu metode yang cocok dalam domain afektif adalah metode klarifikasi nilai-nilai (*values clarification*), yang pada prinsipnya sangat menghindari pemaksaan nilai-nilai pada peserta didik. Gagasan dasar yang melandasi metode ini ialah bahwa setiap siswa berhak dan bertanggung jawab atas pembentukan nilai-nilai hidupnya sendiri. Tugas pendidik hanyalah menyadarkan setiap peserta didik atas nilai-nilai kehidupan yang dipilihnya sendiri secara bebas dan bertanggung jawab. Dalam metode klarifikasi terdapat tujuh langkah yang menjadi prinsip klarifikasi nilai-nilai. Tujuh langkah tersebut dirinci sebagai berikut:

“Pertama, siswa diminta memilah dan memilih nilai secara bebas paksaan dari antara rimba belantara nilai dalam kehidupan ini”.

Kedua, pihak pendidik menyediakan nilai-nilai alternatif lain yang dapat dijadikan acuan siswa.

Ketiga, dengan didampingi pendidik, siswa mempertimbangkan secara rasional pemilihan nilai dan resiko dari nilai yang dipilih tadi.

Keempat, siswa menjadi bahagia/puas dengan nilai yang dipilih tersebut dan nilai tersebut menjadi hal yang positif dalam hidupnya.

Kelima, siswa menegaskan bahwa nilai yang dipilihnya adalah nilai yang benar, dan berani menyatakan di muka umum.

Keenam, siswa melaksanakan tindakan konkrit dari nilai yang telah disebutkan, bukan hanya merupakan gagasan, atau keinginan saja.

Ketujuh, menjadikan nilai tersebut sebagai pola hidupnya. (disarikan dari Pungki Setiawan, *Kompas*, 22 Januari 2001).

Untuk mengarahkan peserta didik menginternalisasi, menerapkan/*melakoni* nilai-nilai tersebut, diperlukan hubungan yang dekat antara peserta didik dan guru. Hubungan yang dekat ini mengakibatkan mereka saling mengetahui dan siswa dapat menjaga sikap dirinya untuk berlaku baik.

Guru sebagai pendidik di sekolah berkedudukan bukan sebagai penguasa yang siap memberikan perintah kepada mahasiswa, melainkan ia sebagai pengayom, pembimbing dan pendorong siswa dalam pembelajaran. Maka wajarlah jika guru berpedoman pada semboyan: *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani*. Dalam semboyan ini hubungan antara guru – murid dekat, pendekatan bersifat humanistik, bersifat kekeluargaan, hangat, terbuka, serta tidak ada tekanan/paksaan. Jika hal-hal yang tersebut terlaksana dalam hubungan guru-murid, maka kesatuan dan persatuan akan terjaga dalam lingkup kecil sekolah yang tentunya diharapkan pula untuk melebar ke arah yang lebih besar yakni bukan hanya persatuan dan kesatuan lingkungan sekolah, namun dapat bersifat nasional bermuara pada integrasi bangsa.

### Evaluasi

Evaluasi/alat penilaian dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pun sulit dilaksanakan karena seperti telah disebutkan, bahwa pembelajaran PKn termasuk dalam kawasan kognitif, afektif dan psikomotor dan bahkan lebih dominan pada aspek afektifnya. Kawasan afektif tidak akan berkembang jika kawasan kognitifnya tidak baik. Nilai dan sikap tidak akan tumbuh begitu saja kalau kognitifnya tidak baik, maka nilai dan sikap (afektif) akan dipengaruhi oleh aspek kognitifnya dan selanjutnya akan mempengaruhi pada pengamalan (psikomotor).

Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk/alat penilaian harus menggunakan berbagai bentuk tes, antara lain *multiple choice, essay*, membuat laporan/makalah, dan sedapat mungkin diadakan pengamatan sehari-hari. Mungkin si x mendapat nilai 8 dalam ulangan/ujian, karena pengetahuannya (kognitif), belum menyentuh afektif dan psikomotornya. Si X tersebut tidak menjawab fakta apa adanya (*das sein*) tetapi menjawab apa yang seharusnya. (*das sollen*). Untuk itulah diusahakan sejauh mungkin penilaian dengan observasi langsung.

Depdiknas mengeluarkan rambu-rambu dalam penilaian, yakni dikaitkan dengan hal-hal sebagai berikut:

Kelas I, I dan III SD/MI dengan permainan dan stimulasi. Kelas IV, V dan VI dapat dilakukan dengan membuat karangan, menganalisis suatu isu atau kasus yang dikutip guru dari koran dan majalah. Untuk SLTP/M. Ts. Dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi masalah kebijaksanaan umum, (2) mengumpulkan dan mengevaluasi informasi berkaitan dengan masalah, (3) menguji dan mengevaluasi pemecahan (4) memilih dan mengembangkan kebijaksanaan umum yang diusulkan, (5) mengembangkan rencana tindakan, dan (6) mengevaluasi pelaksanaan tindakan. Di tingkat Sekolah Menengah Umum/Kejuruan atau Madrasah Aliyah, dilakukan dengan pengaplikasian metode-metode ilmiah (*the application of the scientific methods*) seperti metode pemecahan masalah (*problem solving method*) dan metode inkuiri (*inquiry method*). (disarikan dari Depdiknas, 2000: 5).

Guru sebagai pembimbing kelas harus mengarahkan pada integrasi bangsa bukan mendorong ke arah disintegrasi bangsa, di samping itu menolak keras paham separatis.

### Beberapa kelemahan dan Solusi Pendidikan Kewarganegaraan

Kekerasan, kerusakan, kasus-kasus berbau SARA dan keinginan beberapa daerah untuk merdeka, mengundang kita untuk berpikir kembali tentang keberadaan pendidikan kita dewasa ini, dengan bertanya: Apakah sistem pendidikan kita salah?, Bagaimana peran PKn dan Pendidikan Agama Azhari Noer mengatakan:

“Kegagalan sistem pendidikan semacam ini terletak pada kegagalan sistem pendidikan humaniora, yang meliputi agama, filsafat, bahasa dan sastra, seni, dan sebagainya (PKn termasuk didalamnya – *penulis*). Wilayah humaniora memang termasuk dalam ruang lingkup sistem pendidikan kita, tetapi wilayah ini hanya sebagai “pelengkap” karena dianggap tidak menjamin masa depan anak didik secara material. Humaniora telah menjadi bidang yang ditempatkan pada “kelas

dua” oleh masyarakat yang memang telah dijangkiti penyakit konsumerisme yang berorientasi kepada kehidupan yang materialistis”. (Kautsar Azhari Noer, dalam Th. Sumartana, dkk. 2001: 233).

Jika ditarik benang merah dari uraian sebelumnya, ada beberapa kelemahan pendidikan kewarganegaraan antara lain disebabkan :

1. Pendidikan selama ini menekankan pada transfer ilmu kepada peserta didik, kurang memperhatikan aspek nilai (value). Hal yang seperti ini dapat diibaratkan seperti mengisi sesuatu ke barang kosong.
2. PKn hanyalah pelengkap kurikulum atau “kelas dua”, dan dilain pihak siswa merasa *ogah-ogahan* (acuh tak acuh) dengan materi PKn.
3. Pembelajaran memakai metode indoktrinasi.
4. Kurangnya pembahasan materi yang berkaitan dengan kerukunan, cinta kasih, tolong menolong, toleransi, persatuan (integrasi) bangsa.

Dari permasalahan tersebut, jika diatasi dengan langkah-langkah perbaikan yang benar dan tepat melalui pembelajaran PKn, masalah integrasi akan ber-kurang bahkan akan hilang, walaupun hasilnya memakan waktu yang lama, tidak seperti membalik telapak tangan.. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Pembelajaran PKn harus berlangsung secara manusiawi, lebih mementingkan penanaman nilai/value bukan sekedar transfer pengetahuan.
2. PKn disetarakan dengan mata pelajaran lain, dan dimungkinkan juga siswa mendapat nilai 5 (lima) dan guru dapat memebrikan materi yang menarik dengan menagjukan banyak alternatif pilihan (dalam diskusi) sehingga siswa dapat ikut berpartisipasi dan sekaligus berpendapat dengan mengajukan argumentasi-argumentasi.
3. Pembelajaran dengan pendekatan humanistik, kekeluargaan, hangat, terbuka dan ada saling kepercayaan antara guru – siswa, dengan menggunakan metode

kolaboratif-partipatoris, values clarification dan inquiry..

4. Siswa diberi contoh konkrit sekaligus diminta untuk mengamalkan nilai-nilai kerukunan, cinta kasih, tolong menolong, toleransi dan persatuan.

### Kesimpulan

Paradigma baru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau *civics education* adalah suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori dan memperoleh pengalaman praktis-empiris. Dalam pembelajaran PKn lebih mementingkan proses. Guru berperan membimbing, dan melibatkan siswa dalam proses pemecahan persoalan, bukan sekedar alih pengetahuan yang mirip mengisi botol kosong. Yang hendak dicapai dalam PKn ini adalah *character building*, yang nantinya akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku siswa, yang semakin baik dan bertanggung jawab menuju pada integrasi bangsa.

Pakar pendidikan mengatakan untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan yang mengarah pada disintegrasi bangsa, perlu diantisipasi oleh bangsa Indonesia dengan pendidikan yang benar dan tepat, khususnya dalam pembelajaran PKn, karena didalamnya memuat pendidikan moral (budi pekerti), pendidikan politik, pendidikan falsafah negara, pendidikan sosial dan pendidikan budaya bangsa.

Pembelajaran PKn, yang diarahkan pada integrasi bangsa tersebut dilakukan dengan sistem pembelajaran yang integratif dengan memperhatikan komponen-komponen antara lain (1) tujuan pendidikan dengan menuntut peserta didik berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dalam kegiatan berbangsa dan bernegara, (2) landasan filosofis, sosial-budaya, dan pedagogis yang mengarahkan peserta didik hidup secara manusiawi sesuai dengan martabat manusia yang mulia dengan menjaga integritas (keutuhan) bangsa, (3) metode penyampaian dengan mengaplikasikan metode-metode ilmiah (*the application of the scientific methods*) antara lain metode

klarifikasi nilai-nilai (*values clarification*), metode pemecahan masalah (*problem solving methods*), metode inkuiri (*inquiry method*) dengan pendekatan humanistik, bersifat kekeluargaan, hangat, terbuka dan bukan indoktrinasi, (4) bentuk/alat penilaian dengan menggunakan berbagai bentuk tes (*multiple choice, essay*, membuat laporan/makalah dan sedapat mungkin pengamatan sehari-hari).

Dengan demikian tujuan pendidikan, landasan, metode penyampaian, bentuk/alat pendidikan, jika dapat berjalan dengan baik dan seimbang akan menyumbang kearah sasaran yang hendak dicapai, yang masing-masing komponen mempunyai kadar yang sama. Jika komponen tersebut tidak seimbang, tentunya juga akan mengganggu terlaksananya pembelajaran yang akan berpengaruh pula terhadap tujuan yang hendak dicapai, yakni integrasi bangsa.

#### Daftar Pustaka

- Ankersmit, F.R. 1987. *Refleksi tentang Sejarah. Pendapat-pendapat Modern Filsafat Sejarah*. Jakarta PT. Gramedia.
- Bahar, Ahmad. 1997. *Presiden Ketiga*. Yogyakarta: Pena Cendekia.
- Darmodihardjo, Darji. 1983. *Pancasila Dasar Negara dalam Prospek Rekonstruksi Nasional*. Jakarta: Aries Lima
- Djahiri, Achmad Kosasih. 1985. *Strategi Pengajaran Afektif-Niali-Moral. VCT Dan Games dalam VCT*. Bandung : Jrs. PMPKN. FPIPS IKIP. Bandung.
- Djalal, Hasjim. 2000. "Masa Depan Indonesia Sebagai Negara Kesatuan" *.Semiloka. Dosen-dosen Kewarganegaraan se Indonesia*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Standar Nasioanal Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), untu Pendidikan Dasar dan Menegah Jakarta*.
- Faridah. 1992. *Konsep Dasar Pendidikan Umum. (Tesis)*. Bandung: PPS IKIP Bandung.
- Oetama, Jacob. dkk. 2001. *Demokrasi, Kekerasan, Disintegrasi*. Jakarta: Kompas.